

## **FENOMENA 'COLORISM' SEBAGAI BENTUK STRATIFIKASI SOSIAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA**

Jusmalia Oktaviani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani  
[jusmalia.oktaviani@lecture.unjani.ac.id](mailto:jusmalia.oktaviani@lecture.unjani.ac.id)

### **Abstrak**

*Penelitian ini merupakan riset awal untuk melihat gambaran besar mengenai Colorism di Kawasan Asia Tenggara. Colorism merupakan bentuk diskriminasi kepada seseorang karena perbedaan warna kulit. Dalam Colorism biasanya mereka yang memiliki warna kulit lebih cerah diberikan akses lebih mudah dalam berbagai hal. Colorism dikatakan sebagai fenomena global, namun dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menggambarkan fenomena tersebut di kawasan Asia Tenggara. Metode yang peneliti gunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui focus group discussion dan studi pustaka. Kerangka teoritis dalam studi ini adalah Poskolonialisme, konsep Kekerasan serta konsep Colorism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Colorism di wilayah Asia Tenggara terjadi salah satunya diperkuat oleh inferioritas masyarakat di Asia Tenggara terhadap kulit putih sebagai hasil dari penjajahan, akibat dari kelas-kelas sosial yang selama ini dikonstruksi oleh penjajah untuk melanggengkan kekuasaan mereka.*

**Keywords:** Colorism, rasisme, warna kulit, poskolonialisme

### **PENDAHULUAN**

Colorism, merupakan diskriminasi yang terjadi kepada seseorang karena warna kulitnya, seperti yang didefinisikan oleh Bhattacharya (2012), menyatakan bahwa Colorism, *the differential treatment of individuals in economic and social transactions based solely on differences in skin color, is pervasive in modern societies. Expressed positively, Colorism is a preference for persons of lighter skin; expressed negatively, it is the exclusion, denial, or penalizing of persons of darker skin* (Bhattacharya, 2012). Herring (2004) mengatakan dalam Obiora Anekwe bahwa Colorism merupakan *“discriminatory treatment of individuals falling within the same ‘racial’ group on the basis of skin color”* (Anekwe, 2014). Dengan kata lain, Colorism berbeda dengan rasisme meskipun ada hubungan erat antara

keduanya, namun *Colorism* bisa terjadi tanpa memandang ras. *Colorism* bisa terjadi dalam satu ras yang sama atau yang berbeda ras. Bila diskriminasi dalam rasisme akan terjadi pada ras-ras tertentu saja, namun dalam hal *Colorism* maka ada kecenderungan, orang yang warna kulit lebih cerah yang akan terpilih atau mendapat keistimewaan meskipun rasnya sama. Gender pun kadang berkaitan erat dengan *Colorism*, karena terkait dengan penampilan fisik mengenai konstruksi sosial terhadap siapa yang lebih menarik, cantik, dan seterusnya dari warna kulitnya. Akibatnya, wanita lebih sering mendapat dampak yang lebih besar dalam fenomena ini dibanding pria (Norwood, 2015).

*Colorism* dikatakan sebagai fenomena global. Pada berbagai artikel, disebutkan bahwa *Colorism* juga terjadi di Kawasan Asia, termasuk Asia Tenggara (Bagalini, 2020; Filippi, 2019; Huang, 2020; Salvá, 2019). Kawasan Asia Tenggara adalah kawasan yang sangat unik dengan multikulturalisme yang kaya, dengan berbagai etnik, ras, agama, dan unsur budaya lainnya. Sehingga segregasi dan diskriminasi, sangat rentan terjadi. Dengan bingkai *Colorism* dan perspektif dari Ilmu Hubungan Internasional, diharapkan mampu melihat Kawasan Asia Tenggara dari sudut pandang berbeda dan mampu mendorong kebijakan yang lebih baik pula.

Peneliti akan melihat *Colorism* yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dari perspektif Poskolonialisme. Poskolonialisme digunakan untuk kerangka analisis karena hampir semua negara di Asia Tenggara pernah di bawah masa penjajahan yang cukup lama, sehingga penelitian ini ingin melihat apakah *Colorism* merupakan produk yang lahir dari kolonialisme tersebut. Peradaban Barat mendominasi cara pandang kepada dunia yang dianggap 'non-Barat'. Bias ini begitu kuat sampai masyarakat non-Barat pun tidak menyadari bahwa cara pandang Barat ini sangat mempengaruhi cara masyarakat memandang dunia. Dalam poskolonialisme, kita diajak untuk melakukan refleksi diri dengan semua pengetahuan yang kita miliki selama ini, bahwa cara pandang kita melihat realitas dunia yang kita pahami, sebenarnya adalah produk dari kekuasaan Barat. Hal ini selaras dengan apa yang dimaksud oleh Foucault dalam Rosyidin, bahwa produk pengetahuan yang kita ketahui sekarang tentang hubungan internasional, sebenarnya adalah bentuk superioritas Barat atas Timur (Rosyidin,

2020). Hegemoni Budaya ini mengukuhkan posisi Barat di atas Timur, sehingga membuat Barat mampu mendefinisikan dirinya lebih tinggi dan lebih unggul daripada Timur. Posisi ini sangat kukuh hingga tidak ada kajian Timur yang mampu menandingi kajian orientalisme Barat semenjak Barat meraih keunggulannya di masa pencerahan (Said, 2016). Dengan teori dan konsep dalam HI, peneliti akan menjawab pertanyaan: *Bagaimana gambaran fenomena 'Colorism' sebagai bentuk stratifikasi sosial di kawasan Asia Tenggara?* Penelitian ini merupakan penelitian awal yang berusaha melihat secara gambaran besar fenomena *Colorism* terjadi di Kawasan Asia Tenggara, khususnya pada Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Pada bagian awal analisis, akan digambarkan terlebih dahulu fenomena *Colorism* secara global melalui negara lain yakni Amerika Serikat, Jepang, India, dan China.

Ada beberapa tinjauan pustaka yang berkontribusi terhadap penelitian ini, yang diurutkan berdasarkan tahun terbitan, yang pertama sebuah studi yang meneliti mengenai *Colorism* di India, dilakukan oleh Wardhani, Era Largis, dan Vinsensio Dugis (2018) berjudul *Colorism, Mimicry, and Beauty Construction in Modern India*. Dalam penelitian ini meyakini bahwa kepercayaan diri wanita India yang rendah mengenai kulit mereka yang gelap sehingga harus menggunakan produk pencerah atau pemutih kulit, sebenarnya adalah produk dari hirarki rasial, kolonialisme dan kekerasan yang terjadi di masa lampau. Diskriminasi terhadap warna kulit ini terjadi karena tertanamnya citra bahwa mereka yang berkulit putih lebih superior dan lebih diterima secara sosial. Jurnal ini menggunakan pendekatan poskolonialisme, yang memaparkan beberapa perspektif dari tokoh-tokoh pendekatan ini, yakni pemikiran Bhabha mengenai mimikri, pemikiran dari Fanon, serta Edward Said dalam buku *Orientalisme* (Wardhani et al., 2017).

Kedua adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iris Sumo (2019) membahas mengenai *Colorism* dan dampaknya pada kehidupan wanita *African-American*. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melaksanakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam pada 10 wanita *African-American*. Temuan dari studi ini menyatakan bahwa wanita-wanita ini menyadari adanya struktur sosial yang menempatkan warna kulit

yang lebih cerah lebih tinggi daripada mereka yang berkulit lebih gelap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita berkulit lebih gelap mendapat stigma sebagai wanita yang berada di bawah standar kecantikan (Sumo, 2019).

Penelitian Kim (2020) meneliti mengenai Stratifikasi Ras dan *Colorism* di Korea Selatan, yang berdampak pada Pendidikan Multikultural Korea. Dalam penelitian ini, Kim mengakui adanya sumbangan kerangka berpikir *Colorism* yang diambil dari penelitian berbasis ras kulit hitam di Amerika Serikat. Penelitian mengenai *Colorism* menariknya tidak hanya menyangkut masalah ras saja. Bahkan dalam masyarakat dengan ras yang kurang lebih sama, warna kulit bisa mempengaruhi. Sehingga Penelitian ini bisa dilakukan di masyarakat Korea Selatan yang selama ini mengakui identitasnya sebagai bangsa yang homogen. Namun seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya imigran, Korea Selatan harus menghadapi situasi dimana negara ini mulai menghadapi masyarakat multikultur (Kim, 2020).

Sebelum membahas mengenai fenomena *Colorism*, akan dijelaskan terlebih dahulu kerangka teoritis yang digunakan untuk membingkai fenomena tersebut. Hal ini diperlukan untuk melihat bagaimana fenomena tersebut akan dianalisis. Kerangka Teoritis meliputi perspektif Poskolonialisme, konsep Kekerasan, dan Konsep *Colorism* itu sendiri.

### **Poskolonialisme**

Pemikiran poskolonialisme diletakkan oleh poststrukturalisme. Poskolonialisme memberikan cara pandang berbeda karena ia mengkritisi adanya bias budaya dan bias kekuasaan, terutama dari peradaban Barat. Peradaban Barat mendominasi cara pandang kepada dunia yang dianggap 'non-Barat'. Bias ini begitu kuat sampai masyarakat non-Barat pun tidak menyadari bahwa cara pandang Barat ini sangat mempengaruhi cara masyarakat memandang dunia (Rosyidin, 2020).

Seperti dijelaskan sebelumnya, pemikiran poststrukturalis dari Michael Foucault bisa menjadi dasar untuk mengerti mengenai gagasan poskolonialisme ini. Foucault memaknai bahwa ada keterkaitan erat antara pengetahuan dan kekuasaan. Pelaksanaan kekuasaan menciptakan munculnya objek-objek baru

pengetahuan dan mengakumulasi bentuk-bentuk baru informasi. Dengan kata lain, kekuasaan mampu membentuk pengetahuan, dan timbal baliknya adalah pengetahuan melanggengkan kekuasaan (Rosyidin, 2020).

Dengan kata lain, hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan inilah yang akan membentuk diskursus dominan di masyarakat. Pada akhirnya, diskursus dominan menjelma menjadi sebuah kebenaran. Kebenaran ini pun tentunya sudah sesuai dengan yang dikehendaki pemegang kekuasaan. Foucault mengatakan hal ini sebagai rezim kebenaran. Jadi meskipun sebuah pengetahuan merupakan bias kekuasaan, namun akan tetap diyakini oleh kebenaran. Apalagi, penguasa akan berupaya supaya ada upaya untuk mengendalikan 'kaum lainnya' agar proses penciptaan pengetahuan ini bisa langgeng dan terus dipercaya masyarakat. Rosyidin mengatakan sebagai contoh adalah pemerintahan Orde Baru yang memunculkan istilah 'bahaya laten komunisme' untuk menekan kelompok kiri (Rosyidin, 2020).

Dalam poskolonialisme, kita diajak untuk melakukan refleksi diri dengan semua pengetahuan yang kita miliki selama ini, bahwa cara pandang kita melihat realitas dunia yang kita pahami, sebenarnya adalah produk dari kekuasaan Barat. Hal ini selaras dengan apa yang dimaksud oleh Foucault, bahwa produk pengetahuan yang kita ketahui sekarang tentang hubungan internasional, sebenarnya adalah bentuk superioritas Barat atas Timur (Rosyidin, 2020).

Dalam bukunya, Rosyidin mengemukakan 3 tokoh dalam pemikiran poskolonialisme, antara lain: Fanon, Edward Said, dan Spivak. Di sini, penulis mengutip buku *Orientalisme* oleh Edward Said yang merupakan salah satu karya yang menyumbang pemikiran dalam Poskolonialisme. Dalam buku tersebut ada istilah yang disebut dengan hegemoni budaya. Menurut Gramsci, dalam masyarakat yang tidak totaliter, akan tumbuh budaya-budaya yang nantinya kebudayaan tertentu akan terlihat lebih unggul atau dominan dibanding yang lain. Konsep ini diidentifikasi dengan hegemoni, atau secara spesifik hegemoni budaya (Said, 2016). Hegemoni Budaya ini mengukuhkan posisi Barat di atas Timur, sehingga membuat Barat mampu mendefinisikan dirinya lebih tinggi dan lebih unggul daripada Timur (Said, 2016). Kajian Timur

pun tidak ada yang mampu menandingi posisi kajian Barat dalam berbagai bidang keilmuan. Akibatnya hingga kini, semenjak abad pencerahan, Kajian Timur sering kali dianggap sebagai 'alternatif' dari Barat.

Asumsi dasar Poskolonialisme antara lain sebagai berikut (Rosyidin, 2020):

1. Hakikat aktor internasional: Ada dua aktor internasional dari dua peradaban, yakni Barat dan non-Barat.
2. Konsep kepentingan nasional: Tidak dilihat dari kepentingan negara masing-masing, namun dari dikotomi Barat dan non-Barat yang mana menyebarkan cara pandang Barat (*Eurosentris*) atau melakukan perlawanan terhadapnya.
3. Struktur internasional: politik dunia bersifat hierarkis, Barat ada dalam posisi superior dibanding non-Barat. Hal ini karena non-Barat dilabel oleh Barat sebagai terbelakang, tidak terdidik, irasional, tidak demokratis, dan label-label lainnya. Sehingga peradaban Barat dianggap harus disebarluaskan, termasuk kepada masyarakat non-Barat.

Inti pemikiran poskolonialisme dijelaskan oleh Sheila Nair, pola pikir Barat terhadap Non-Barat adalah hasil dari penjajahan yang telah mereka lakukan. Hal ini membuat cara berpikir dunia saat ini sebenarnya dibentuk oleh pemikiran-pemikiran Barat, yang secara tidak langsung telah memarginalkan Non-Barat, karena telah dikuasainya pengetahuan oleh Barat. Ditambah lagi wacana yang muncul adalah non-Barat sering kali digambarkan oleh Barat tersebut sebagai '*other/* yang lain' seakan di dunia yang berbeda, dan tampil sebagai sosok yang dianggap lebih inferior. Poskolonialisme berupaya menjelaskan mengapa terjadi kesenjangan dan akumulasi kesejahteraan pada beberapa negara tertentu (Nair, 2017).

Berbeda dengan Marxisme, poskolonialisme menganggap bahwa bukan perjuangan kelas yang menjadi akar perubahan sejarah, melainkan ras-lah yang mengubah sejarah. Selain itu, apabila pemikiran-pemikiran arus-utama dalam HI menganggap bahwa struktur internasional adalah anarki, poskolonialisme menganggap bahwa struktur internasional adalah hirarki (Nair, 2017). Dengan

kata lain, poskolonialisme berfokus pada "*racial binaries*", yang menurut Nair, pemikiran tersebut masih relevan bahkan hingga setelah usainya penjajahan. Lebih jelasnya, oposisi biner yang dimaksud yakni: *Center and Periphery; Coloniser and Colonised; First World and Third World*. Hal ini semakin diperumit dengan sistem di masyarakat yang meliputi kelas, kasta, ras, gender, yang juga memperdalam kajian mengenai studi kolonial ini (Tay, 2011). Oleh karena itulah, perasaan inferior yang terjadi pada kaum yang dijajah merupakan korelasi dari perasaan superior oleh penjajah. Dengan dalih melakukan '*civilization*', terjadi hubungan yang tidak seimbang antara penjajah dengan yang dijajah, bahkan dilakukanlah eksploitasi ekonomi secara besar-besaran (Tay, 2011).

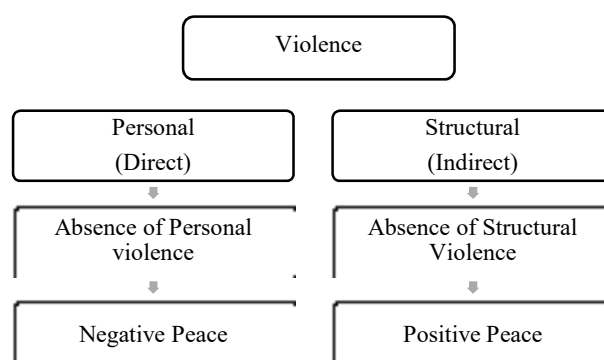
Nair menyebutkan, poskolonialisme relevan dan bahkan tidak hanya bisa dilihat dari sejarah, namun juga pada isu-isu kontemporer. Contohnya adalah masalah kepemilikan senjata nuklir oleh Iran dan Korea Utara, yang kemudian dianggap sebagai '*rouge states*' oleh Amerika Serikat. Tuduhan kepada kedua negara sebagai negara berkembang, kurang rasional, berbahaya, tidak bertanggung jawab, dan wacana dominan sejenis merupakan contoh wacana yang rasis. Dalam debat seperti ini, poskolonialisme tidak mempertanyakan siapa yang pantas memiliki senjata nuklir, namun 'siapa yang pantas dipercaya untuk menentukan kepemilikan senjata, dan mengapa?' (Nair, 2017)

Lebih jauh lagi, ada poskolonialis feminis yang berupaya melihat lebih jauh dari feminis pada umumnya yakni patriarki dan ketidaksetaraan gender. Poskolonialis feminis memandang ada unsur kelas dan rasis yang memberikan keistimewaan pada wanita dengan kulit putih dibanding kulit berwarna. Wanita dengan kulit berwarna mendapat tiga kali bentuk penindasan yakni dikarenakan ras atau etnis mereka; status kelasnya atau kastanya; dan gender atau jenis kelaminnya. Dengan demikian, perspektif poskolonialisme membantu kita melihat lebih jauh lagi pada ketidakadilan dan penindasan yang mungkin terjadi sehari-hari. Poskolonialisme mengajak kita untuk melihat dari kacamata mereka yang dalam posisi lemah dan tertindas karena kurangnya kekuasaan (Nair, 2017).

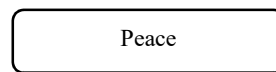
### **Konsep Kekerasan (*Violence*) oleh Johan Galtung**

Johan Galtung merupakan pakar dalam Studi Perdamaian yang memberikan perspektif baru dalam konsep Kekerasan. Kekerasan yang nampak atau yang terlihat bukan hanya merupakan sebuah fenomena yang tunggal, misalnya hanya disebabkan oleh masalah individu semata. Namun apabila kita melihat jauh lebih mendalam, kekerasan yang terlihat sebenarnya memiliki kaitan mendalam dengan faktor-faktor lainnya. Oleh karenanya, kekerasan pun memiliki beberapa terminologi seperti kekerasan struktural, kekerasan kultural, kekerasan langsung, kekerasan personal, dan sebagainya.

Galtung dalam *“Violence, Peace, and Peace Research”* mengatakan bahwa *“Violence is present when human beings are being influenced so that their actual somatic and mental realizations are below their potential realizations”* (Galtung, 1969, p. 168). Galtung dalam hal ini merujuk pada kekerasan sebagai konsep yang sangat luas. Galtung mencontohkan, orang yang meninggal karena sakit TBC pada abad 18 dianggap wajar pada saat itu. Namun apabila jumlah kematian akibat TBC cukup tinggi di masa modern saat ini dengan berkembangnya ilmu kedokteran dan teknologi kesehatan, maka meninggalnya orang tersebut bisa dianggap sebagai bentuk kekerasan (Galtung, 1969, pp. 170–171). Kekerasan juga bisa terjadi dalam bentuk yang tidak terlihat, ketika terjadi ketimpangan dan diskriminasi dalam distribusi dari sumber daya, baik pendapatan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Ketika penguasa yang menentukan distribusi tersebut tidak membagi secara adil dan berimbang, maka disitulah kekerasan struktural terjadi (Galtung, 1969, p. 171). Gambar di bawah ini menunjukkan pemikiran Galtung mengenai perdamaian yang terdiri atas dua bagian, yakni ketiadaan kekerasan personal yang disebut *‘negative peace’*/ kekerasan negatif dan ketiadaan kekerasan struktural yang disebut *‘positive peace’*/ kekerasan positif (Galtung, 1969, p. 183).

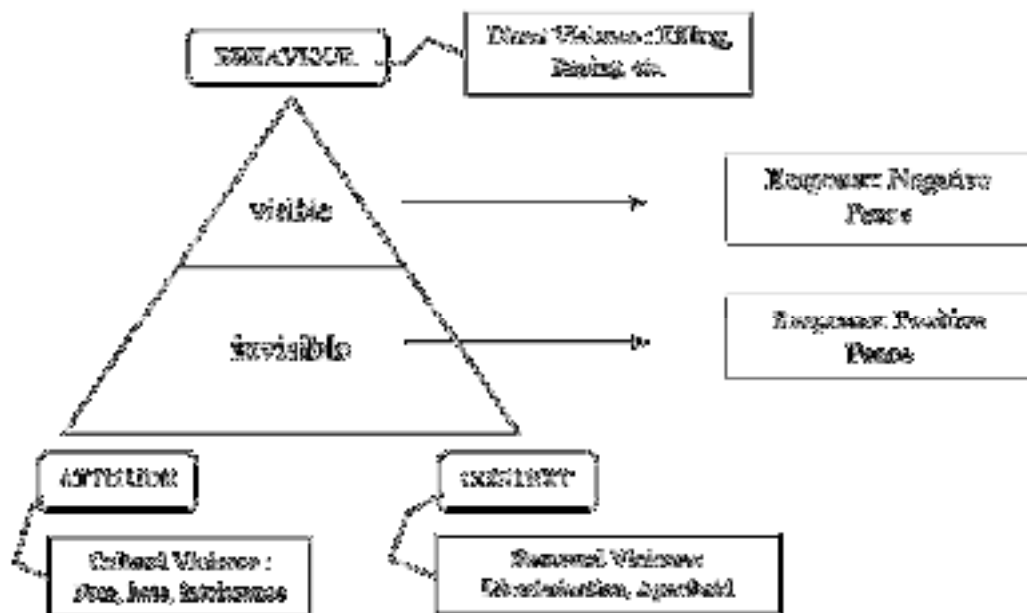






Gambar 1. The Extended Concept of Violence and Peace

Dalam “*Cultural Violence*” Galtung menyatakan bahwa kekerasan kultural merupakan aspek-aspek dari budaya yang bisa melegitimasi kekerasan langsung dan atau kekerasan struktural. Aspek budaya tersebut meliputi agama, budaya, bahasa, seni, dan seterusnya. Kekerasan kultural akan membuat kekerasan langsung dan kekerasan struktural terasa benar untuk dilakukan, sehingga kekerasan tersebut diterima di masyarakat dan tidak dianggap sebagai sebuah penyimpangan atau kesalahan di masyarakat (Galtung, 1990, pp. 291–292). Konsep ini juga dikenal dengan Segitiga ABC atau *The ABC Triangle* yang merujuk pada **A**ttitude (sikap), **B**ehaviour (tingkah laku), **C**ontext (konteks) yang muncul dari bentuk kekerasan kultural, kekerasan langsung, serta kekerasan struktural seperti tergambar di bawah ini (Fisher et al., 2001, p. 10):

Gambar .2. The ABC Triangle by Johan Galtung  
Diadaptasi dari Fisher, Simon, et al (eds.) (hal.10)

Jacoby (2007, p. 39) mengutip Galtung, menekankan bahwa ada beberapa poin yang perlu diketahui mengenai kekerasan: 1. kekerasan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik psikologis maupun psikis. 2. Kekerasan 'disembunyikan' sebagai bentuk 'hadiah'. 3. Kekerasan tidak harus selalu pada manusia itu sendiri, kerusakan pada properti juga termasuk. 4. Kekerasan terjadi tidak harus secara langsung, seperti rasisme yang membuat seseorang terhalang potensinya karena struktur sosial di masyarakat. 5. Kekerasan bisa tetap hadir, meskipun tidak disengaja atau tidak ada intensi melakukan kekerasan. 6. Kekerasan ada dalam bentuk terlihat maupun tidak terlihat (laten).

Selain itu, Tim Jacoby juga memaparkan tabel kekerasan langsung dan kekerasan struktural oleh Köhler and Alcock sebagai berikut (2007, p. 45):

Tabel.1. Direct Violence and Structural Violence

	<b><i>Violent Input</i></b>	<b><i>Violent Output</i></b>
<i>Direct Violence</i>	<i>Deployment of armed men, bombing, etc.</i>	<i>People killed by war.</i>
<i>Structural Violence</i>	<i>Malnutrition, lack of shelter, health, care, etc.</i>	<i>People killed by a lack of necessities.</i>

Sumber: Jacoby (hal.45)

Dengan demikian kekerasan bisa dimulai dari berbagai bentuk baik kekerasan langsung, kekerasan struktural, maupun kekerasan budaya. Galtung menyebutkan dengan model segitiga kekerasan, maka kekerasan dari satu aspek akan mudah merembet pada bentuk kekerasan lainnya. Ketika kekerasan struktural telah terinstitusionalisasi, didukung dengan kekerasan kultural yang melekat dalam masyarakat, maka kekerasan secara langsung akan muncul secara lebih terstruktur dan berulang dalam masyarakat (Galtung, 1990, p. 302).

### **Konsep Colorism**

Manusia merupakan spesies visual dan masing-masing merespon satu sama lain berdasarkan penampilan fisik, yang membuat warna kulit sangatlah

penting. Prasangka terhadap ras yang melekat pada warna kulit tertentu, menjadikan warna kulit sebagai sebuah identitas dan nilai yang signifikan. Walaupun ras dibahas sebagai penanda identitas yang penting, sebetulnya warna kulit juga menjadi sangat signifikan khususnya bagi negara-negara yang memiliki masyarakat dengan keberagaman populasi. Selama abad ke-21, dengan perluasan komunitas dengan perkawinan antarras dan imigrasi, warna kulit akan menjadi hal yang lebih penting dibandingkan dengan ras dalam interaksi publik maupun pribadi. Hal ini disebabkan oleh fakta tak terbantahkan bahwa secara visual warna kulit seseorang tidak bisa disembunyikan, sedangkan ras merupakan klasifikasi yang dibentuk atau dikonstruksi dalam bingkai politis dan terkadang hanya terlihat pada surat resmi pemerintahan (Yeung, 2015).

*Colorism* berangkat dari asumsi mengenai pentingnya warna kulit tersebut, sehingga ada warna kulit tertentu yang diunggulkan dan ada yang tidak, sehingga *Colorism* dapat didefinisikan sebagai diskriminasi berdasarkan warna kulit. Pada dasarnya, akademisi sudah banyak yang membahas tentang rasisme, namun subjek bias warna kulit atau *Colorism* meskipun mirip rasisme namun berbeda karena bias yang terjadi tidak memandang ras. Tindakan *Colorism* sering dilakukan oleh individu dari satu ras terhadap ras yang lain, namun bias warna kulit atau *Colorism* bahkan sering terjadi di antara anggota kelompok etnis atau ras yang sama (Bagalini, 2020).

Dalam sebuah artikel *TIME*, dikatakan bahwa Alice Walker yang merupakan penulis dan aktivis dianggap sebagai orang yang pertama kali dengan menggunakan kata '*Colorism*', pada esai dengan judul *In Search of Our Mother's Garden* dalam bukunya yang dipublikasikan pada tahun 1983, ia mendefinisikan *Colorism* sebagai "perlakuan merugikan atau preferensial terhadap orang-orang dari ras yang sama hanya berdasarkan warna kulit mereka." Walaupun preferensi perbedaan tindakan dari masyarakat berkulit terang terhadap masyarakat berkulit gelap telah terjadi selama beberapa generasi, Walker menganggap *Colorism* sebagai hal yang penting dan merupakan sebuah kejahatan yang harus dihentikan agar masyarakat Afrika-Amerika juga dapat maju sebagai manusia (Tharps, 2016).

Berbicara mengenai *Colorism*, maka kita juga akan berhadapan dengan istilah lain yang juga membahas keunggulan kulit putih yakni *Whiteness* dan *White Supremacy*. Istilah *Whiteness* dan *White Privilege* merupakan salah satu tema yang muncul dalam kajian "*Whiteness*" (*Whiteness Study*). Kajian ini melihat bahwa para pemilik kulit putih diuntungkan dalam berbagai bidang kehidupan karena warna kulit mereka, dalam hal ini mereka mendapatkan akses dan kekuasaan yang lebih besar pada sumber daya, apabila dibandingkan mereka yang kulit berwarna "*People of Color*". Meskipun demikian keistimewaan kulit putih atau *White privilege* ini harus dilihat juga dari pemahaman yang menyeluruh terhadap stratifikasi rasial di masyarakat (Kim, 2020).

Secara istilah, *whiteness* dan *White Supremacy* dalam Merriam-Webster dictionary diartikan sebagai:

- 1 : *the belief that the white race is inherently superior to other races and that white people should have control over people of other races*
- 2 : *the social, economic, and political systems that collectively enable white people to maintain power over people of other races* (Merriam-Webster, n.d.)

Dalam artikel di Daily Mirror disebutkan bahwa sejak dulu, telah terjadi kecenderungan untuk memberikan keistimewaan pada kulit harus yang lebih putih atau cerah. Ia juga menyatakan bahwa wanita dengan kulit putih atau kulit lebih cerah mendapatkan berbagai keistimewaan, baik dalam ketenaran dan standar hidup. Sehingga, mereka memiliki posisi yang lebih tinggi dalam hierarki sosial (Wickramasinghe, 2017). Bahkan, dalam sejarah Sri Lanka, raja-raja dahulu memiliki '*anthappuraya*', yaitu gadis-gadis yang disukai oleh raja dan berkulit putih. Hal tersebut menjadikan kulit putih sebagai model simbolis yang dapat berkorelasi secara positif dengan pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan status perkawinan (Saraswati et al., 2019).

Orang berkulit gelap telah memiliki pandangan sejak dini bahwa mereka harus berkulit putih untuk mendapatkan perhatian orang lain. Pemanfaatan individu berkulit putih dalam promosi produk di iklan-iklan televisi seakan menegaskan hal ini. Masyarakat secara tidak langsung didorong untuk memilih orang berkulit putih untuk mewakili posisi yang lebih tinggi dalam masyarakat.

Sebagai contoh, kita menemukan bahwa wanita berkulit putih cenderung mendominasi kontes kecantikan. Dominasi ini dapat kita sebut dengan “Hegemoni Kulit Putih/ *White Hegemony*”, yang mana masyarakat lebih mempercayai bahwa kulit putih lebih menarik dari kulit gelap. Sehingga kita dapat merasakan bahwa orang berkulit putih menjadi ikon yang dominan dalam masyarakat.

Menariknya, karakteristik untuk berkulit putih agar lebih menarik ini lebih kentara terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki (Saraswati et al., 2019). Penelitian Hall menjelaskan bagaimana stratifikasi warna kulit mempengaruhi kehidupan wanita Afrika-Amerika secara psikologis. Penelitian ini dilakukan dengan diskusi fokus grup dengan penekanan pada pengalaman beberapa wanita kulit hitam mengenai warna kulit mereka. Wanita kulit hitam merupakan pihak yang rentan didiskriminasi, sehingga ada istilah *gendered Colorism*. Masyarakat lebih menyukai wanita Kaukasian dengan kulit yang terang, sehingga wanita yang berkulit lebih gelap merasakan kepercayaan diri yang lebih rendah terlepas dari kontribusi dan prestasi mereka (Hall, 2017, p. 72).

Wanita lebih terdampak terhadap *Colorism* karena wanita dipandang dari segi penampilan dibanding laki-laki. Sementara itu penampilan yang menarik diasosiasikan dengan kulit yang terang, sehingga di Amerika sendiri wanita berkulit hitam sudah pasti terdampak terhadap pandangan ini. Karena *gendered Colorism* tidak memandang batasan ras, wanita yang berkulit lebih gelap dalam ras yang sama pun merasakan tekanan dalam kehidupan bermasyarakat karena mereka menganggap diri mereka gagal memenuhi standar ideal kecantikan. Para wanita ini merasa tidak berdaya jika harus dihadapkan dengan kesempatan-kesempatan dalam hal sosial, ekonomi, bahkan hubungan asmara karena kurang nyaman dengan kulit mereka. Pada akhirnya, struktur dan hirarki dalam masyarakat didapat dari stratifikasi warna kulit, bukan lagi ras (Hall, 2017, p. 77).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif. Metode Kualitatif dipilih karena peneliti berfokus pada *natural setting* dan *social setting* yang mampu memunculkan makna (*meaning*) di

balik emosi, motivasi, simpati, dan sebagainya yang memang menjadi bagian dari kehidupan manusia baik individu maupun kelompok (Hillebrand & Berg, 2000). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah teknik studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yang bersumber pada literatur-literatur ilmiah, seperti buku-buku, makalah, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen resmi yang diterbitkan maupun tidak dari sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan kajian penelitian. Data ini kemudian bisa menambah serta mengecek data primer yang diperoleh dari pelaksanaan *Focus Discussion Group* (FGD) sebelumnya. Yang kedua melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Peneliti melakukan metode riset kualitatif dengan mengadakan diskusi terfokus dari suatu grup atau kelompok untuk membahas suatu hal tertentu. Peneliti melaksanakan FGD mengenai penelitian ini dengan difasilitasi oleh Pusat Studi Ilmu Hubungan Internasional di Fisip Unjani (Pusat Studi HI FISIP UNJANI, 2021).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, yakni melalui (Sugiyono, 2014): 1) Reduksi Data, yaitu memilih dan memilah data-data pokok yang sesuai dengan fokus penelitian; 2) Penyajian data, yakni langkah menyajikan data dalam bentuk : kata-kata, kalimat-kalimat, gambar, simbol, skema, bagan, grafik, tabel, dan matriks; 3) Verifikasi Data, yaitu data yang telah terkumpul, diuji secara empiris sehingga validitas, realibilitas dan obyektivitas data teruji. Uji keabsahan data yang dilakukan dengan menggunakan uji kredibilitas dengan cara-cara berikut yakni: (Sugiyono, 2014) Perpanjangan Pengamatan; Meningkatkan ketekunan; Triangulasi, yakni *cross check* atau pemeriksaan silang antara data, dengan tujuan untuk memperoleh kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sumber, teknik dan waktu. Terakhir adalah diskusi dengan Teman Sejawat (*peer-review*), yang dalam penelitian ini dilakukan dengan asisten peneliti, serta saat pelaksanaan FGD bersama rekan dosen di Fisip Unjani.

## **PEMBAHASAN**

### **Fenomena *Colorism* Secara Global**

Secara umum, tindakan yang mengarah pada bias warna kulit terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satu negara besar yang mengalaminya adalah Amerika Serikat dengan isu rasismenya, oleh karena itulah Kampanye *Black Lives Matter* yang sempat merebak mengangkat tentang masalah rasisme ini. Di AS sendiri, warna kulit hitam akan dianggap sebelah mata sedangkan warna kulit terang akan memiliki keistimewaan dikarenakan nilai rasisme yang masih mengakar kuat. Hal ini karena AS merupakan sebuah negara yang dibangun di atas prinsip rasisme. Apabila rasisme tidak ada, maka pembahasan mengenai keberagaman warna kulit hanya akan menjadi diskusi tentang nilai estetika. Namun, permasalahan utamanya berakar pada berbagai akses, kesempatan, kemudahan, dan keistimewaan warna kulit terang di atas gelap yang menyebabkan terjadinya *Colorism* (Saraswati et al., 2019).

Masyarakat Amerika bukanlah satu-satunya masyarakat yang terobsesi terhadap seberapa terang atau gelap warna kulit seseorang, bahkan *Colorism* juga dirasakan di seluruh dunia, terutama di Amerika Latin, Asia Timur dan Tenggara, serta Karibia dan Afrika. Dengan kondisi populasi AS yang sangat beragam dan berasal dari seluruh penjuru dunia, *Colorism* terjadi pada mereka yang lama tinggal di AS dan juga berasal dari luar AS (Saraswati et al., 2019).

Salah satu indikator untuk melihat fenomena ini adalah dengan tingginya permintaan global atas produk pencerah kulit. Berdasarkan data historis melalui riset pasar yang dilakukan oleh Zion, produk pencerah kulit terjual dengan cepat di banyak pasar pada tahun 2019 dan penjualan global diperkirakan akan meningkat \$4 miliar sejak tahun 2017 menjadi \$8,9 miliar pada tahun 2024 (Bagalini, 2020). Banyak negara di Afrika, pemerintahnya berjuang keras untuk mengatur penjualan produk pencerah kulit dengan komposisi berbahaya; di India, penyelenggara kontes kecantikan menerima kritikan karena hanya memilih kontestan yang memenuhi kriteria cantik ideal Eurosentris; dan di Brasil, warga dengan kulit gelap harus menghadapi kelangkaan kesempatan untuk mencapai mobilitas sosial ke atas (Bagalini, 2020).

Selain Amerika Serikat, India adalah salah satu negara dengan budaya *Colorism* yang masih sangat kental. Wanita India berkulit gelap menghadapi diskriminasi di tempat kerja, di sekolah, bahkan dalam hubungan percintaan.

Menurut *World Health Organization* (WHO), tidak heran apabila setengah dari semua produk perawatan kulit di India, merupakan produk pencerah yang dirancang untuk “mencerahkan/ memutihkan” warna kulit. WHO juga memperkirakan bahwa setidaknya di India saja produk tersebut berjumlah sekitar \$500 juta industri (Frayer, 2020). Sumber lain menyatakan bahwa konsumen terbesar untuk produk pemutih kulit berasal dari Asia Selatan. Namun demikian, pengguna pencerah kulit tetap tersebar merata di Asia berdasarkan Nielsen (2007) dimana penggunaanya berasal dari China, Taiwan, Korea, Jepang, dll (Jones, 2013, p. 1117).

Kampanye *Black Lives Matter* di Amerika Serikat mendorong masyarakat di India untuk menyuarakan kritik mengenai *Colorism* serta diskriminasi berdasarkan kasta yang terjadi di negara mereka. *Colorism* yang terjadi di India merupakan bentuk dari penjajahan Inggris, yang mana penjajah Inggris mempunyai kulit yang lebih putih. Namun, akar permasalahannya mungkin lebih jauh kembali ke sistem kasta kuno Hindu, kira-kira berdasarkan hierarki profesi tempat dilahirkannya seseorang. Selama berabad-abad, mereka yang lahir dari kasta lebih rendah, harus mengerjakan pekerjaan kasar di bawah sinar matahari yang terik di luar ruangan, sehingga kulit terpapar sinar matahari yang membuat lebih gelap. Mereka yang kulitnya lebih gelap dari kasta yang lebih rendah, sehingga ada stigma bahwa mereka yang berkulit gelap berarti harus bekerja susah payah di bawah sinar matahari, yang membuat kulit mereka menjadi secoklat gandum atau yang sering disebut *wheatish* (Purnell, 2013). Dengan adanya internalisasi prasangka tersebut, tidak heran apabila individu dengan kulit yang lebih cerah memiliki penghidupan yang lebih baik dibandingkan mereka yang berkulit lebih gelap (Frayer, 2020).

Hubungan antara asumsi kulit gelap dengan tingkat kemapanan sosial ekonomi terjadi di berbagai negara di Asia lainnya seperti Asia Timur. Mereka yang berkulit lebih cerah seakan berada pada status yang lebih tinggi. Di Jepang, kulit putih dengan warna '*ivory*' yang mirip seperti telur rebus yang lembut, putih, dan mulus di permukaan lebih disukai. Hal ini juga bisa terlacak dari sejarah Jepang, karena saat itu wanita sering menggunakan bedak hingga berwarna putih pada wajahnya untuk menunjukkan status elit. Negara-negara di



Asia disebutkan oleh Rondilla dan Spickard telah lama memuja warna kulit yang lebih cerah, terutama pada wanita. Mereka yang menjadi selebriti misalnya, memiliki stuktur geometri khas dari orang kebanyakan yakni lebih tinggi dan lebih putih (Harian Inhua Online, 2018) .

Penelitian Evelyn Yeung di tahun 2015, mengeksplorasi mengenai *Colorism* di China, terutama pada wanita. Di China, pencerah kulit juga merupakan produk yang menguasai pasar—setidaknya sepertiga produk tersebut terjual di China. Dalam sejarah China, mereka yang berkulit putih atau terang dianggap memiliki status aristokrat. Alasannya yakni pemilik kulit gelap dimaknai sebagai kerja keras para buruh dan petani di luar ruangan yang membuat mereka terbakar matahari. Berbeda dengan para elit yang tidak harus bekerja keras dan tetap bisa di dalam ruangan, sehingga mereka yang berkulit cerah dianggap memiliki posisi yang tinggi secara sosio-ekonomi. Seperti halnya perhiasan atau pakaian yang mampu menandai status ekonomi seseorang, warna kulit pun dianggap sebagai bagian dari identitas yang menunjukkan status tertentu. Pemaknaan wanita yang cantik dalam sastra China kuno, juga sering kali menyebutkan kata seperti salju ataupun es, yang mengarah pada kulit yang putih (Yeung, 2015).

Dari perspektif yang berbeda, keinginan untuk memiliki kulit yang lebih cerah sebetulnya hadir karena keinginan untuk mendapatkan *power*. Sebagai dampak dari *White Hegemony*, orang-orang yang kulitnya lebih gelap ingin mendapatkan keistimewaan yang sama dengan mereka yang berkulit cerah. Terlepas dari efektivitas produk-produk tersebut, dengan meningkatnya kekuatan ekonomi China dan kemudahan akses berbelanja, tetap saja produk pemutih laris di pasaran. Wanita, terutama, merasa bahwa dirinya dihargai dari fisik dan kecantikannya. Dari survei pada mahasiswa wanita di China, mereka menganggap penampilan yang menarik—dalam hal ini kulit cerah—sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan impian dan juga pasangan idaman (Yeung, 2015).

Peningkatan daya beli sebagai hasil dari pesatnya kemajuan ekonomi China membuat wanita kini mempunyai pilihan untuk bisa membeli produk-produk kecantikan termasuk pemutih kulit. Produk-produk pencerah kulit yang

masuk dalam kategori merek yang mahal, juga menandai pembelinya sebagai orang yang kaya. Oleh karenanya, wanita berkulit lebih gelap semakin tidak disukai dalam dunia modern karena menandakan wanita tersebut tidak mampu merawat dirinya. Jadi meskipun zaman telah berubah, namun komersialisasi dan konsumerisme saat ini menjadi salah satu faktor yang menyebarkan nilai kulit putih tersebut. Walau ada perbedaan antara China di masa lampau dengan saat ini, namun tetap saja kehidupan modern menuntut kulit yang lebih cerah pada wanita sebagai standar ideal (Yeung, 2015).

### **Deskripsi Fenomena *Colorism* di Kawasan Asia Tenggara**

Masyarakat Asia Tenggara tidak terlepas terhadap fenomena *Colorism* karena kawasan ini pada dasarnya multikultural meskipun tidak berbagi sejarah yang sama mengenai ras seperti pada Amerika Serikat. Seperti dijelaskan sebelumnya, di Amerika Serikat, terjadinya diferensiasi dan klasifikasi merupakan hal yang mengakar dari sejarah, karena sejak awal telah terjadi perbudakan dan rasialisme pada keturunan kulit hitam.

Hampir semua negara di Kawasan Asia Tenggara mengalami penjajahan dari bangsa Eropa, kecuali Thailand. Meski tidak dieksploitasi secara langsung seperti negara tetangganya, tidak menghalangi interaksinya dengan bangsa Barat karena peran Thailand sebagai *buffer zone*. Juga ada sedikit perbedaan, yang mana di Malaysia pembagian berdasarkan etnis merupakan hal yang sudah menjadi kebijakan secara politik, namun tidak semua negara di Asia Tenggara berbagi hal yang sama. Dengan basis penjajahan yang cukup lama dari Bangsa Eropa tersebut, membuat artikel ini mendasarkan pada Poskolonialisme sebagai kerangka untuk memahami fenomena *Colorism*.

Di beberapa negara di Asia Tenggara, fenomena *Colorism* nyata terjadi karena kulit yang cerah atau putih mendapat keistimewaan daripada mereka yang kulitnya lebih gelap. Hal yang kemudian membedakan dengan India atau AS adalah, di kawasan ini tidak ada perbedaan ras yang mencolok seperti yang terjadi di Amerika Serikat, serta tidak terjadi perbedaan kasta seperti di India. Mungkin ada beberapa masyarakat Hindu, namun tradisi tersebut tidak sekental di India. Begitu pula dengan masalah ras dan etnis di Amerika Serikat, di Asia ras dan etnis tidak seperti ras Negro kulit hitam dari Afrika versus Kaukasian

kulit putih Eropa. Ras yang menonjol ada di beberapa tempat, namun masalah etnis menjadi pembeda yang cukup signifikan.

Kulit putih dikatakan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Asia Tenggara sebagai sesuatu yang dianggap lebih baik daripada kulit gelap. Stigma tersebut membuat individu dengan kulit gelap berusaha untuk memiliki kulit yang cerah. Meski menyebut kawasan Asia Tenggara, namun penelitian ini akan mengambil tiga negara besar di Asia Tenggara yakni Thailand, Malaysia, dan Indonesia sebagai perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara.

Dalam tulisan mengenai standar kecantikan di Thailand, Salvá menuliskan bahwa di Thailand pun standar kulit putih sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Dalam artikel tersebut, asisten profesor studi seksualitas di *National Institute of Development Administration*, Jaray Singhakowinta mengatakan bahwa kulit putih mungkin telah menjadi ciri penting bagi standar kecantikan Thailand, tetapi konsep tersebut kini telah bergeser. Dahulu, di dalam sastra klasik Thailand, penggambaran wanita yang cantik digambarkan melalui pahlawan wanita yang berkulit putih seperti dicat dengan emas. Namun, hal itu kini berlaku di masa lalu. Kini, warna kulit yang disukai adalah putih merah muda yang diakibatkan oleh maraknya pengaruh Barat dan Korea (Salvá, 2019). Hal ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat Thailand di Bangkok terlihat menaungi diri mereka dengan payung atau mengenakan baju berlengan panjang walaupun saat musim yang sangat panas agar mereka tidak terpapar sinar matahari yang menyengat (Salvá, 2019). Tak ubahnya di Indonesia, konsep berjemur dianggap sebagai sesuatu yang aneh dan harus dihindari, kulit belang karena sebagai terpapar sinar matahari pun dianggap sebagai suatu masalah karena dianggap tidak mampu melindungi kulit.

Melonjaknya industri musik pop dan drama televisi Korea telah memperburuk obsesi terhadap kulit putih yang dimulai 20 tahun yang lalu melalui tayangnya drama Korea di Thailand. Sejak saat itu, permintaan masyarakat Thailand terhadap makanan dan produk Korea pun meningkat. Selanjutnya, Jaray juga mengatakan bahwa citra aktor dan produk kecantikan Korea telah menjadi fitur paling umum dalam industri hiburan di Thailand. Sehingga, masyarakat Thailand menghubungkan kecantikan ala Korea sebagai

standar kecantikan yang universal, seperti memiliki wajah yang oval, memiliki kulit yang halus dan mulus seperti mutiara, dan memiliki hidung runcing (Salvá, 2019).

Survei yang dilakukan oleh WHO juga menemukan bahwa setidaknya terdapat 40 persen wanita di China, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan yang menggunakan produk pencerah kulit. Sehingga, *Global Industry Analysts, inc.* sebagai firma intelijen pasar juga memproyeksikan bahwa pada tahun 2024, permintaan produk pemutih akan meningkat hingga mencapai angka AS\$31,2 miliar (Salvá, 2019).

Persepsi kulit putih di Thailand berbeda dengan di Amerika Serikat misalnya, yang mana kulit hitam dipersepsikan sebagai bagian dari sejarah negara dengan masalah rasisme, perbudakan, maupun kasta. Hal ini dikarenakan di Thailand dan juga di beberapa negara Asia, masyarakat sebagian bersifat homogen secara etnis dan ras, sehingga berbeda pandangan dengan negara yang pada dasarnya heterogen ataupun multikultur. Namun pandangan bahwa kulit putih menandakan seseorang dari kelas sosial yang lebih tinggi, juga berlaku di negara ini, seperti pada negara Asia lainnya. Meskipun tidak ada sejarah perbudakan di Thailand, kulit putih mendapat kelas yang lebih baik karena mereka dianggap tidak perlu keluar rumah mengerjakan pekerjaan yang kasar dan berada di bawah matahari. Pandangan ini diperparah dengan budaya dari luar seperti budaya Barat dengan standar kecantikannya serta kemunculan budaya populer dari Jepang dan Korea yang juga menunjukkan kulit yang lebih putih, sehingga mereka yang berkulit lebih gelap seakan tidak mendapat tempat karena tidak mampu mencapai 'standar' (Purnell, 2013).

Begitu pun di Malaysia, masyarakatnya yang terbagi menjadi 3 etnis mayoritas, juga mengalami hal yang kurang lebih sama, yakni adanya prasangka berlebihan terhadap orang asing berkulit hitam. Mereka yang berkulit hitam akan mendapat label 'migran' karena dianggap secara ekonomi lebih miskin atau lebih parahnya lagi, penjahat. Sementara orang asing berkulit putih dianggap 'ekspatriat'. Kebijakan-kebijakan politik yang sifatnya diskriminatif, misalnya melarang orang kulit hitam menyewa properti, memperparah prasangka ini. Hal ini dianggap sebagai bagian dari warisan penjajahan Eropa yang juga

menempatkan kulit yang lebih gelap berada di lapisan bawah, sehingga mereka dianggap punya kemampuan ekonomi yang kurang, dan juga dianggap tidak menarik dari segi fisik (Harian Inhua Online, 2018).

Di Indonesia, penelitian yang menarik dari Umarela, dkk mengenai penggunaan karakter *blackface* dalam iklan televisi juga mengungkapkan supremasi kulit putih di masyarakat Indonesia (Umarela et al., 2020). Dalam penelitian ini, memperlihatkan bahwa iklan dari sebuah aplikasi *marketplace* Bukalapak menggunakan tokoh berkulit hitam. Tanda-tanda dalam iklan dikaji secara bertahap untuk mendapatkan makna pesan dan juga membongkar mitos yang bersembunyi di balik ideologi yang terkandung dalam iklan.

Hasil analisis semiotik menemukan bahwa iklan Bukalapak menunjukkan unsur rasisme yang terlihat dari penggunaan *blackface* sebagai wahana untuk menyampaikan komedi. Dalam iklan ini unsur rasisme terlihat jelas karena kulit putih dianggap lebih unggul dengan adanya beberapa adegan yang menunjukkan hal tersebut. Praktek merendahkan kulit hitam ini dianggap hal yang lumrah di masyarakat Indonesia yang tanpa secara sadar dipercayai kebenarannya (Umarela, Dwityas, & Zahra, 2020).

Secara fundamental, stratifikasi sosial di Asia merupakan akar daripada *Colorism* dan berbagai bentuk diskriminasi dan bias yang dihasilkannya. Ketika rasionalisme perbudakan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa Barat seperti Portugal, Spanyol, dan Inggris Raya, telah secara langsung menyebabkan rasisme, di Kawasan Asia secara umum, perdebatan mengenai warna kulit dan standar kecantikan berakar pada norma budaya yang dipercayai secara turun temurun sebagai kelas sosial, dimana individu dengan kulit gelap diasosiasikan dengan pekerjaan di ladang dan kemiskinan, dan di sisi lain, individu berkulit pucat dan cerah dikaitkan dengan gaya hidup kosmopolitan yang lebih nyaman di dalam ruangan dan jauh dari matahari (Huang, 2020; Salvá, 2019).

Pengaruh Barat dalam persepsi kecantikan di media telah mempengaruhi pengiklanan produk kosmetik lokal dan pakaian dengan model Asia yang berkulit putih atau ras Kaukasian di Asia Tenggara dan tidak melibatkan model dengan kulit lebih gelap, walaupun sebenarnya akar dari *Colorism* sendiri

berawal pada masa kolonialisme. Sehingga, seiring berjalannya waktu, hal ini telah mempengaruhi persepsi dan opini masyarakat mengenai warna kulit.

Setelah penelitian dilakukan oleh iPrice Group sebagai *e-commerce* di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Thailand, ditemukan dalam katalog produk mereka bahwa terdapat lebih banyak produk yang ditandai dengan kata kunci “pemutih” sebanyak 204,000 produk dibandingkan produk “penggelap” kulit yang hanya berkisar 7,000 produk. Dengan ketersediaan yang signifikan daripada produk “penggelap” kulit di Asia Tenggara membuktikan tingginya permintaan konsumen terhadap produk pemutih (Filippi, 2019).

Di berbagai belahan dunia, wanita adalah pihak yang paling terdampak dalam *Colorism* ini. Baik di Asia maupun di luar Asia, wanita selalu menjadi pihak yang paling rentan mengalami diskriminasi akibat *Colorism*. Ada perbedaan mendasar antara Asia Tenggara dengan wilayah lainnya bahkan termasuk dengan Asia Timur, yakni pada kawasan Asia Tenggara, kulit putih dipandang lebih terhormat karena tidak harus mengerjakan pekerjaan kasar di bawah sinar matahari. Secara tidak langsung, *Colorism* lebih ‘jarang disuarakan’ daripada terminologi lainnya, seperti rasisme. Namun pada dasarnya bentuk-bentuk *Colorism* dan *White Privilege* telah ada pada masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Dalam penelitian lainnya oleh Rondilla seperti dikutip oleh Trina Jones ditemukan bahwa tidak berarti wanita Asia ingin meniru atau ingin menjadi seperti wanita Eropa. Di Filipina, wanita-wanita Filipina bangga dengan keunikan mereka sebagai wanita Asia, mereka tidak serta merta ingin mengubah warna rambut menjadi blonde atau menginginkan mata biru. Adapun bentuk ideal wanita Asia tersebut setidaknya memiliki kulit cerah, mata yang besar, rambut hitam, dan tidak gemuk. Namun penggunaan produk pencerah kulit tetap marak karena dimaksudkan untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka masing-masing (Jones, 2013, p. 1118).

Preferensi kepada warna kulit putih atau terang merupakan fenomena yang terjadi secara transnasional (Saraswati et al., 2019, p. 9). Warna kulit putih atau terang berasosiasi dengan femininitas. Hal ini karena gender hirau dengan

hal ini, sehingga perempuan lebih dituntut untuk merawat dan memutihkan kulit, sementara laki-laki tidak. Dalam bukunya, Saraswati menginterpretasikan bahwa 'Putih' memang punya 'afek' yang bersinggungan dengan 'terang, kebaikan' sementara hitam atau gelap berdampak rasa sebaliknya. Oleh karena itu, putih tidak bisa hanya diakibatkan oleh penjajahan semata, karena dari sebelum jaman penjajah pun, warna putih lebih disukai. Meski demikian, makna putih sebelum adanya kolonial, tidak berjaln kelindan dengan ras. Masa penjajahan Belanda dan dilanjutkan dengan Jepang-lah yang kemudian mengasosiasikan makna putih ideal adalah putih ala Kaukasian, bukan putih ala orang Asia misalnya, seperti kulit orang China. Kulit orang China yang juga cerah dan putih mendapat label lain yakni 'kuning'. Seperti kita ketahui bahwa warna kulit yang dikaitkan dengan ras ini pada dasarnya adalah klasifikasi yang menegaskan superioritas kulit putih untuk memuluskan jalannya menjajah bangsa lain (Saraswati et al., 2019).

Bentuk-bentuk diskriminasi terhadap warna kulit harus lebih dikampanyekan di kawasan Asia Tenggara karena diskriminasi dan stratifikasi sosial dalam bentuk seperti ini dikhawatirkan bisa memecah kawasan ini lebih jauh. Populasi yang cenderung homogen di Asia telah menyebabkan keberlanjutan stereotip terhadap masyarakat berkulit gelap, masyarakat adat, masyarakat Asia Tenggara, dan juga orang-orang keturunan Afrika (Huang, 2020).

Walaupun kepercayaan ini sudah tertanam dalam pemikiran komunitas masyarakat Asia, namun karena bahasan ini dapat dengan mudahnya diabaikan sebagai suatu “budaya”, maka masyarakat pun cenderung sulit untuk membahas hal ini (Huang, 2020). Hal ini telah dijelaskan dalam kekerasan struktural yang dibahas oleh Galtung sebelumnya, karena telah membudaya dan mengakar, kekerasan yang meskipun dia tidak terlihat secara langsung, bentuk kekerasan secara kultural dan struktural terjadi di masyarakat.

Dalam hal ini, obsesi masyarakat Asia terhadap kulit putih sangat tidak sehat dan hal itu juga sangat mengkhawatirkan. Studi pendahuluan yang dilakukan Universiti Putra Malaysia (UPM) membuktikan bahwa para mahasiswi di Malaysia sebenarnya sudah tahu bahan kandungan dan bahaya serta efek

samping dari penggunaan produk pencerah kulit yang mereka pakai. Namun, mereka masih bersedia menggunakan produk tersebut karena mereka percaya bahwa manfaat bagi kepuasan dan kepercayaan diri lebih banyak daripada kerugian jangka panjang yang akan mengganggu kesehatan mereka. Hasil penelitian tersebut telah menjadi bukti konkret betapa obsesi tidak sehat untuk mendapat kulit putih ini telah mengucilkan individu dengan kulit yang lebih gelap. Sehingga, mereka menjadi kehilangan rasa percaya diri dan berlomba untuk mencapai standar kecantikan ideal yang tidak realistis (Filippi, 2019).

Dengan kata lain, apabila diurutkan lebih jauh ke belakang, bahwa sebetulnya akar dari *Colorism* di Asia Tenggara sudah ada dari dulu. Berbagai sejarah beberapa negara seperti Thailand dan Indonesia membuktikan preferensi yang condong pada kulit terang dibanding kulit gelap. Namun, pemilihan ini tidak ada kaitan dengan kelas sosial, ras, atau hal lainnya yang ada kaitannya dengan stratifikasi sosial.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena *Colorism* ini telah ada di masyarakat karena secara kultur telah ada historis bahwa kulit putih lebih disukai. Namun budaya dari masa lampau tersebut bukannya hilang namun malah semakin meningkat dengan adanya:

- a. kedatangan para penjajah yang meneguhkan kulit putih Kaukasian;
- b. munculnya penjajah Jepang yang mengembalikan kebanggaan pada kulit putih dari ras Asia; serta
- c. globalisasi kebudayaan Barat yang kembali mengunggulkan fitur ras Kaukasian dan,
- d. Gelombang Korea (*Hallyu*) yang membawa standar baru bagi kecantikan kulit putih Asia.

Dengan kerangka *Colorism* ini pula, peneliti berpendapat bahwa salah satu akar kekerasan di kawasan Asia Tenggara, terutama kebencian pada etnis atau ras tertentu, mungkin disebabkan oleh *Colorism* ini. Sulit untuk mengakui bahwa kita memang rasis, hanya karena ras di Asia Tenggara tidak semencolok perbedaan dengan AS atau kasta di India. Seperti pada penelitian Kim, bahwa masyarakat Korea Selatan yang tadinya homogen, mulai kedatangan arus



imigran yang banyak karena peningkatan perekonomian di negara tersebut. Gelombang Korea juga menjadi salah satu penarik wisatawan ke negara tersebut, bahkan ada yang sampai menetap di negeri ginseng tersebut karena jatuh cinta pada negara itu. Terjadinya perkawinan antarras akhirnya menjadi tidak terelakkan. Masyarakat di sana pun mulai merasakan heterogenitas yang tadinya tidak begitu terasa. Benturan antarras pun dibuktikan dalam penelitian Kim ini (Kim, 2020).

Seperti rasisme yang terjadi pada masyarakat Papua di Indonesia, perlakuan terhadap warga Rohingya di Myanmar, menurut penulis dimungkinkan dilandasi oleh rasa tidak aman dan tidak nyaman dengan warna kulit mereka yang lebih gelap. Dalam kerangka teori sebelumnya, telah dijelaskan ada kekerasan struktural oleh Galtung yang membahas mengenai jenis kekerasan lainnya seperti kekerasan kultural dan kekerasan langsung. Galtung percaya bahwa manusia tidak serta merta melakukan kekerasan langsung, namun ada faktor lain yang mendorong dan faktor tersebut adalah kekerasan struktural dan kultural yang mengakar dan melegitimasi terjadinya kekerasan secara langsung oleh individu. Dalam penelitian ini, *Colorism* tersebut berlaku sebagai kekerasan kultural yang melandasi orang untuk bersikap berbeda hanya karena melihat warna kulit. Masalahnya memang tidak seperti kesukuan, kadang orang memang tidak mudah untuk diketahui identitasnya begitu saja. Akan tetapi, mudah untuk melihat warna kulit karena memang langsung terlihat secara kasat mata. Kesulitan akses pekerjaan, jodoh, karir, pendidikan, yang dirasakan oleh mereka yang kulitnya lebih gelap, pada akhirnya menjadi bentuk kekerasan struktural. Apalagi, media berhasil menangkap dan memanfaatkan ketakutan manusia untuk strategi penjualan produk-produk pemutih kulit.

Apabila didasarkan pada kerangka Poskolonialisme, maka ada keyakinan bahwa rasa tidak nyaman dengan kulit sendiri merupakan hasil dari kolonialisme masala lalu oleh penjajah Eropa. Seperti yang dibahas oleh Wardhani dkk (Wardhani et al., 2017), studi di India menunjukkan bahwa ada rasa ingin meniru (mimikri) pada para penjajah karena mereka dianggap berada dalam kelas yang lebih tinggi. Belum lagi perlakuan penjajah terhadap ras dan

suku lain di masyarakat yang ia jajah, bersifat sangat politis dan sengaja membagi masyarakat dalam berbagai kelas sosial tanpa dasar yang jelas.

Perilaku Mimikri/Peniruan ini dalam berbagai bentuk termasuk segi fisik dan kulit yang berwarna pucat. Bagi masyarakat yang dijajah, perasaan sebagai pihak yang inferior membuat mereka juga ingin naik kelas. Hirarki yang terjadi ini pun secara tidak langsung mengklasifikasikan manusia kulit putih menjadi pihak yang lebih unggul, meskipun tentunya tidak demikian kenyataannya. Namun dalam Poskolonialisme ditekankan bahwa hal tersebut terjadi karena memang ada kelas dalam melihat tatanan dunia, dan di sini Barat merasa sebagai pihak yang beradab, pintar, tinggi, sementara pihak yang dijajah digambarkan tidak beradab, primitif, dan berbeda.

Dalam poskolonialisme, kita diajak untuk melakukan refleksi diri dengan semua pengetahuan yang kita miliki selama ini, bahwa cara pandang kita melihat realitas dunia yang kita pahami, sebenarnya adalah produk dari kekuasaan Barat. Hal ini selaras dengan apa yang dimaksud oleh Foucault, bahwa produk pengetahuan yang kita ketahui sekarang tentang hubungan internasional, sebenarnya adalah bentuk superioritas Barat atas Timur (Rosyidin, 2020). Hegemoni Budaya ini mengukuhkan posisi Barat di atas Timur, sehingga membuat Barat mampu mendefinisikan dirinya lebih tinggi dan lebih unggul daripada Timur. Posisi ini sangat kukuh hingga tidak ada kajian Timur yang mampu menandingi kajian orientalisme Barat semenjak Barat meraih keunggulannya di masa pencerahan (Said, 2016).

Bukan berarti tidak ada diskursus tandingan, karena ada beberapa kampanye yang muncul dari inisiatif publik seperti kulit hitam, kampanye *self-love*, dan sebagainya. Secara sosial, konsumen perlu menyadari bias yang hadir akibat poskolonialisme ini dan mempertanyakan alasan kita memiliki persepsi ini. Secara realistis tidak mungkin persepsi dapat berubah dalam waktu yang dekat. Perubahan signifikan untuk melawan bias dan diskriminasi ini hanya akan terwujud setelah kita mempertanyakan standar kecantikan ini. Khususnya, aksi menantang perusahaan kosmetik dan *fashion* untuk memiliki persepsi kecantikan yang lebih menyeluruh merupakan hal yang penting agar generasi

saat ini dan yang akan datang menyadari bahwa kecantikan tidak memiliki definisi yang pasti (Filippi, 2019).

Dalam praktiknya, hal yang saat ini bisa dilakukan yakni mulai menggaungkan kembali makna kecantikan yang sebetulnya sangat bias. Kampanye-kampanye untuk mencintai diri apa adanya dengan tidak harus menggunakan produk-produk pencerah kulit ramai di media sosial. Selain itu, beberapa media juga tidak lagi mengandalkan standar kecantikan ideal seperti harus berkulit putih ala Kaukasian untuk memunculkan figur atau mengiklankan produk. Beberapa industri yang berhubungan dengan kulit dan kecantikan mulai lebih mempertimbangkan kesetaraan dalam kampanye mereka. Kata-kata yang mengandung '*whitening*' dalam berbagai produk kecantikan pun di Indonesia sudah dilarang. Namun demikian, kampanye ini masih harus diteruskan dan disebarluaskan lebih jauh lagi, mengingat yang mengakar dalam budaya di masyarakat adalah kekerasan budaya yang mengakar begitu lama.

## KESIMPULAN

*Colorism* bisa terjadi pada siapa pun tanpa memandang ras. Untuk kawasan Asia Tenggara, *Colorism* diyakini terjadi sebagai sisa-sisa kolonialisme. Walaupun orang kulit putih dalam hal ini ras Kaukasian di negara-negara tersebut masih menjadi minoritas, namun orang-orang dengan kulit lebih cerah mendapatkan perlakuan istimewa terutama dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan representasi media.

Makna kulit putih sebelum adanya kolonial tidak ada hubungannya sama sekali dengan ras. Seperti kita ketahui bahwa warna kulit yang dikaitkan dengan ras ini pada dasarnya adalah klasifikasi bersifat politis dan tidak ilmiah, yang menegaskan superioritas kulit putih untuk memuluskan jalannya menjajah bangsa lain. Dengan kata lain, digunakan sebagai alat untuk memperlebar kelas sosial dan meneguhkan ras Kaukasian (bangsa Eropa).

Perspektif Poskolonialisme digunakan untuk menganalisis fenomena *Colorism* di Kawasan Asia Tenggara, hal ini karena penjajahan mengklasifikasi masyarakat berdasarkan kepentingan berupa kulit dan ras, seperti penyebutan

kulit kuning untuk orang China atau Jepang, kulit putih untuk bangsa Eropa, dan lain-lain. Meski sebelumnya sudah ada persepsi bahwa kulit putih lebih menarik daripada kulit gelap, namun dari beberapa sejarah seperti di India, Jepang, Thailand dan Indonesia, preferensi mengenai kulit putih dan gelap tidak terkait ras.

Apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat, Asia Tenggara tidak berbagi sejarah yang sama, dalam artian tidak ada sejarah perbudakan dan rasisme seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Sehingga pemaknaan *Colorism* di Asia Tenggara sedikit berbeda dengan di AS. Di kawasan Asia Tenggara yang memang disinari matahari sepanjang waktu, kulit putih juga menandai kelas sosial yang tinggi (kaya, mapan, terawat), yang mana berarti pemiliknya bisa bekerja dalam ruangan yang nyaman dan punya uang untuk merawat kulitnya. Sebaliknya, yang berkulit gelap dianggap dari kelas sosial yang lebih rendah (miskin), karena dianggap tidak bisa merawat dirinya dan bekerja di luar ruangan yang keras, panas dan terik.

Seiring berkembangnya kemajuan negara-negara di Asia Tenggara, kemungkinan preferensi terhadap kulit putih diperparah oleh globalisasi, yang mana representasi media seringkali menampilkan kulit putih dan terang dalam berbagai produk. Rasa tidak aman pun dimunculkan oleh produk pencerah kulit, sehingga mereka yang berkulit gelap tidak nyaman dengan kulit mereka sendiri.

Penelitian selanjutnya bisa difokuskan untuk negara tertentu, misalnya *Colorism* di Indonesia. Bisa juga penelitian lanjutan fokus pada topik tertentu, misalnya bagaimana implikasi politis dari *Colorism* ini berpengaruh lebih lanjut dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Terakhir, peneliti selanjutnya juga bisa menulis melalui perspektif gender, yakni difokuskan pada bagaimana wanita terdampak pada fenomena ini, karena wanita merupakan pihak yang rentan menjadi korban dalam kekerasan struktural ini.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Achmad Yani (LPPM

UNJANI) yang telah memberikan dukungan finansial dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anekwe, O. (2014). Global Colorism: An Ethical Issue and Challenge in Bioethics. *Voices in Bioethics*, 1, 1–17.
- Bagalini, A. (2020). *What is colourism and how can skin-tone bias affect your career?* | *World Economic Forum*. <https://www.weforum.org/agenda/2020/08/racial-equality-skin-tone-bias-colourism/>
- Bhattacharya, S. (2012). The Desire for Whiteness: Can Law and Economics Explain it? *SSRN Electronic Journal*, 117–147. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1743267>
- Filippi, A.-C. (2019). *Who's the fairest of them all? How about, who cares? - Lifestyle - The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/life/2019/08/19/whos-the-fairest-of-them-all-how-about-who-cares.html>
- Fisher, S., Kartikasari, S. N. (Sri N., Responding to Conflict (RTC) (Birmingham), & British Council (Indonesia). (2001). *Mengelola konflik: ketrampilan & strategi untuk bertindak*. [https://books.google.com/books/about/Mengelola\\_konflik.html?hl=id&id=mvYCTwAACAAJ](https://books.google.com/books/about/Mengelola_konflik.html?hl=id&id=mvYCTwAACAAJ)
- Frayser, L. (2020). *Black Lives Matter Inspires Indian Debate Over Skin Lightening: Goats and Soda: NPR*. <https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/07/09/860912124/black-lives-matter-gets-indians-talking-about-skin-lightening-and-colorism>
- Galtung, J. (1969). "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291–305.
- Hall, J. C. (2017). No Longer Invisible: Understanding the Psychosocial Impact of Skin Color Stratification in the Lives of African American Women. *Health and Social Work*, 42(2), 71–78. <https://doi.org/10.1093/hsw/hlx001>
- Harian Inhua Online. (2018). *Mulai dari Rasisme Chinese di Malaysia Hingga Chinese yang Punya Hak Khusus di Singapura: Mengapa Asia Begitu Terpaku Pada Warna Kulit? - Harian Inhua Online*. <https://www.harianinhuaonline.com/mulai-dari-rasisme-chinese-di-malaysia-hingga-chinese-yang-punya-hak-khusus-di-singapura-mengapa-asia-begitu-terpaku-pada-warna-kulit/>
- Hillebrand, J. D., & Berg, B. L. (2000). Qualitative Research Methods for the Social Sciences. In *Teaching Sociology* (Vol. 28, Issue 1). <https://doi.org/10.2307/1319429>
- Huang, J. W. (2020). *Colorism and its impact on anti-black racism in Asia*. | *Medium*. Medium.Com. <https://huangjaz.medium.com/colorism-how->

- beauty-standards-are-strangled-by-western-ideals-ab8743cac8eb
- Jacoby, T. (2007). Understanding conflict and violence: Theoretical and interdisciplinary approaches. In *Understanding Conflict and Violence: Theoretical and Interdisciplinary Approaches*. <https://doi.org/10.4324/9780203028827>
- Jones, T. (2013). The Significance of Skin Color in Asian and Asian-American Communities: Initial Reflections. *UC Irvine Law Review*, 3(4), 1105–1123.
- Kim, H. A. (2020). Understanding “Koreanness”: Racial stratification and colorism in Korea and implications for Korean multicultural education. *International Journal of Multicultural Education*, 22(1), 76–97. <https://doi.org/10.18251/ijme.v22i1.1834>
- Merriam-Webster. (n.d.). *Whiteness Definition & Meaning - Merriam-Webster*. Retrieved May 21, 2022, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/whiteness>
- Nair, S. (2017). Postcolonialism. In S. McGlinchey, Stephen; Waltesr, Rosie; Christian (Ed.), *International Relations Theory* (pp. 69–75). E-International Relations Publishing.
- Norwood, K. J. (2015). “If you is white, you’s alright...” Stories about colorism in America. *Washington University Glocal Studies Law Review*, 14(4), 585–608. <https://eds-a-ebscohost-com.proxy1.ncu.edu/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=6d629840-4d74-4bef-ab63-6fa22d309db5%40sdc-v-sessmgr03>
- Purnell, N. (2013). *Images Spark Racism Debate in Thailand* | *The New Yorker*. The New Yorker. <https://www.newyorker.com/business/currency/images-spark-racism-debate-in-thailand>
- Pusat Sudi HI FISIP UNJANI. (2021). *IRRC FISIP UNJANI MONTHLY DISCUSSION SERIES*. IRRC.
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Said, E. W. (2016). *Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukkan Timur sebagai Subjek*. Pustaka Pelajar.
- Salvá, A. (2019). *Where Does the Asian Obsession With White Skin Come From?* – *The Diplomat*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2019/12/where-does-the-asian-obsession-with-white-skin-come-from/>
- Saraswati, L. A., Andarnuswari, N. D., & Translation of: Saraswati, L. A. (2019). *Putih: warna kulit, ras, dan kecantikan di Indonesia transnasional*. Marjin Kiri.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumo, I. P. (2019). *What Are the Factors of Colorism Amongst African American Women; and How Does This Affect the Lives of African American Women?* <https://scholarworks.lib.csusb.edu/etd>
- Tay, E. (2011). *Colony, nation, and globalisation: not at home in Singaporean*

*and Malaysian literature.* NUS Press.

- Tharps, L. L. (2016). *The Difference Between Racism and Colorism* | Time. <https://time.com/4512430/colorism-in-america/>
- Umarela, F. H., Dwityas, N. A., & Zahra, D. R. (2020). Representasi ideologi supremasi kulit putih dalam iklan televisi. *ProTVF*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v4i1.25172>
- Wardhani, B., Largis, E., & Dugis, V. (2017). Colorism, Mimicry, and Beauty Construction in Modern India. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2). <https://doi.org/10.18196/hi.62118>
- Wickramasinghe, K. (2017). *Fair skin obsession: An inferiority complex that needs treatment - News Features* | Daily Mirror. Daily Mirror Online. <https://www.dailymirror.lk/article/Fair-skin-obsession-An-inferiority-complex-that-needs-treatment-123403.html>
- Yeung, E. (2015). *White and Beautiful: An Examination of Skin Whitening Practices and Female Empowerment in China*. 3(1), 35–47.